

MENIMBANG PENTINGNYA HALUAN NEGARA BAGI INDONESIA RAYA

Abdy Yuhana*

Sekretaris Jenderal DPP Persatuan Alumni GMNI

*Email korespondensi : abdy.yuhana@gmail.com

Diserahkan : 12 Maret 2026

Published : 21 April 2026

Abstrak

Indonesia perlu visi pembangunan yang terencana, berkelanjutan dan menyeluruh tidak hanya mengikuti masa perodesasi Presiden dan setelah presiden berganti maka berubah lagi arah pembangunannya. Visi pimpinan nasional menjadi sesuatu yang sangat penting. Peralnya, dalam kontek bernegara dibutuhkan adanya visi, yaitu arah yang dibutuhkan setiap orang yang berada di dalamnya untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal lainnya, Visi juga merupakan Sebuah gambaran mental yang dapat memberi inspirasi, membangkitkan antusiasme, memacu semangat, memperkuat komitmen, dan menggerakkan ke arah kehidupan yang lebih baik.

Kesadaran berbangsa dan bernegara perlu melihat potensi yang dimiliki berdasar pada geografi politik yang ada. Sebagaimana pendapat Napoleon, politik negara berada dalam geografinya, Begitu pula Bismarck berpendapat, Hanya satu hal yang tidak pernah berubah dalam politik-Politik negara yaitu geografinya dan Bung Karno menyampaikan, jika manusia Indonesia tidak lagi peka dan memahami potensi besar geopolitiknya maka ia akan tetap jatuh menjadi bangsa Kuli yang menjadi kuli di antara bangsa-bangsa. Keberadaan haluan negara sangat penting manakala pembangunan Indonesia saat ini dihadapkan pada problem diskontinuitas dan diskonektivitas. Sangatlah jelas dalam perspektif menimbang pentingnya haluan negara kembali menjadi haluan dalam berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Peralnya, jangan sampai kemajuan Indonesia menjadi 'jalan ditempat'.

Ketergesa-gesaan dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kontek bernegara adalah dengan menghapus GBHN dengan rasionalisasi bahwa di dalam sistem Pemerintahan Presidensial yang menjadi program pembangunan adalah program-program Presiden terpilih yang disampaikan pada saat kampanye pemilihan Presiden. Peralannya kemudian adalah penyelenggara negara yang begitu kompleks tidak bisa hanya diserahkan hanya pada satu cabang kekuasaan negara yaitu Presiden tapi juga perlu melibatkan seluruh komponen negara dari representasi politik, daerah maupun golongan yang sangat beragam.

Perlunya haluan negara diakomodasi lagi dalam konstitusi sangat beralasan dan memiliki dimensi yang urgen jika secara jernih melihat kembali potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu modal sosial, politik dan modal ekonomi dari letak strategis geopolitik Indonesia. Sehingga konstitusi dalam sebuah negara, keberadaannya harus mampu menjawab kebutuhan.

Kata kunci : Haluan Negara, Pembangunan, Visi

Pendahuluan

Keinginan untuk menghidupkan kembali GBHN dengan terminologi kekinian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sesungguhnya memang cukup beralasan hal tersebut didasarkan adanya keinginan bahwa basis pembangunan di Indonesia jelas dan berinduk pada GBHN yang kemudian menjadi cetak biru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama lima Tahunan. Sehingga, untuk menjawab keinginan dari berbagai elemen bangsa akan kegundahan dalam menentukan arah bangsa ini tentang perlunya menghidupkan kembali GBHN adalah sudah saatnya bangsa ini mencari seorang pemimpin yang mempunyai visi keindonesiaan. Seorang pemimpin yang melayani rakyatnya, pemimpin yang tahu kebutuhan Indonesia dalam menghadapi perkembangan dan tantangan zaman. Sebagaimana Bung Karno yang mempunyai tri sakti yaitu berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sesungguhnya masih relevan dan kontekstual.

Terkait dengan soal GBHN itu sendiri, baik juga kalau direnungkan kembali segala rembuk para pendiri negara ini sewaktu merancang UUD (catatan Sekretariat Negara RI telah membukukan risalah sidang BPUPKI- PPKI 25 Mei 1945 - 22 Agustus 1945, dan menerbitkannya pada 1995). Meski disertai debat yang keras para pemimpin merancang dengan terlebih dahulu bersepakat membangun pola pikir yang sama. mereka sepakat berpegang pada bangun negara berdasar desain yang lengkap dari dasar, tujuan hingga konsistensi dalam penjabarannya di dalam batang tubuh UUD. Dalam pikiran dan konsep mereka pula, GBHN diciptakan sebagai perangkat guna menuntun penyelenggara pemerintahan negara dalam upaya mewujudkan tujuan bernegara. Sebagai kaidah penuntun, GBHN karena itu ditetapkan oleh lembaga (MPR) yang dahulu mereka bayangkan sebagai "penjelmaan rakyat, pengembalian kedaulatan rakyat". Dalam konteks pola pikir yang disiplin itu, para pemimpin dahulu membangun nalar dan filosofi GBHN secara runtut.

Pentingnya haluan negara bagi bangsa Indonesia yang kemudian ruh nya berbeda dengan GBHN masa Pemerintahan Orde Baru, yaitu haluan negara yang menjadi panduan bagi bangsa Indonesia harus mencerminkan tiga hal yaitu nasional, semesta dan berencana. Nasional artinya pembangunan itu harus merata tidak tersentral di salah satu pulau saja, sehingga setiap jengkal tanah yang ada di republik Indonesia harus dijaga untuk kepentingan nasional, semesta (menyeluruh), artinya pembangunan tersebut tidak hanya fisik saja tapi penting untuk membangun juga secara spiritual karakter bangsa dan berencana maksudnya adalah pembangunan terus menuju keberlanjutan sampai beberapa tahun kedepan dan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Pembahasan

Menimbang Pentingnya GBHN

Haluan negara dalam terminologi kekinian disebut dengan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) perlu ditelaah dan dibaca secara komprehensif dengan

melihat kondisi Indonesia tidak bisa hanya dilihat dalam sepenggal narasi tentang sistem pemerintahan presidensial yang sangat meniru sistem dari Luar (replikasi) dengan tidak melihat situasi Indonesia. Membaca kembali amandemen sangatlah penting ketika melihat kondisi Indonesia yang saat ini ingin terus mendorong pada pemenuhan persoalan *basic Needs*, pengelolaan SDA, pembangunan SDM. Terlebih lagi pada 2045 Indonesia genap berusia 100 tahun merdeka.

Indonesia perlu visi pembangunan yang terencana, berkelanjutan dan menyeluruh tidak hanya mengikuti masa perodesasi presiden dan setelah presiden berganti maka berubah lagi arah pembangunannya, seperti tari poco-poco ke kiri-ke kanan, berputar tanpa bisa maju kedepan. Kesadaran berbangsa dan bernegara perlu melihat potensi yang dimiliki berdasar pada geografi politik yang ada. Sebagaimana pendapat Napoleon, politik negara berada dalam geografinya, Begitu pula Bismarck berpendapat, Hanya satu hal yang tidak pernah berubah dalam politik-Politik negara yaitu geografinya dan Bung Karno menyampaikan, jika manusia Indonesia tidak lagi peka dan memahami potensi besar geopolitiknya maka ia akan tetap jatuh menjadi bangsa Kuli yang menjadi kuli di antara bangsa-bangsa.

Sebagaimana ditulis Ravik Karsidi, kebutuhan haluan negara baik GBHN, perencanaan pembangunan semesta menjadi penting karena alasan. *Pertama*, alasan historis. Upaya menyusun GBHN pada dasarnya telah dilakukan sejak awal kemerdekaan sebagai bagian dari modal perencanaan ekonomi yang diamankan Pasal 33 UUD 1945. Namun sengaja dihilangkan pada masa reformasi karena dianggap sebagai amanat pemilihan Presiden secara langsung yang memiliki kewenangan membentuk arah pembangunan sesuai visi dan misi kepemimpinannya sendiri. *Kedua*, alasan hukum. Sistem yang dibuat untuk menggantikan peran GBHN, yakni sistem perencanaan pembangunan nasional, seperti berjalan tidak efektif. Padahal, sistem yang lahir dari UU No 25 Tahun 2004 itu diamanatkan untuk dapat menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Kehadiran UU No 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang belum mampu mengakomodasi sebuah pedoman pembangunan dan menyulitkan program pemerintah untuk berjalan secara berkelanjutan. Mengacu pada visi misi Presiden yang kemudian secara detail sebagai rencana pembangunan jangka menengah. Namun visi dan misi Presiden tersebut yang kemudian diterjemahkan dalam RPJM dan RPJP yang dibuat Pemerintah melalui DPR hanya mewakili Partai. Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghendaki konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang dari tingkat pusat hingga daerah.

Ketiga, alasan politik solusi atas segala persoalan yang dialami Indonesia tidak bisa dicari dari luar. Bangsa ini hanya bisa bergerak maju setelah Bangsa ini mampu mengenali dirinya sendiri. Dengan adanya GBHN, pengawasan jalannya pembangunan juga semestinya lebih kuat, pasalnya, seluruh bangsa tahu kemana seharusnya arah tujuan negara. Mungkin masih ada anggapan menghidupkan kembali GBHN ialah kemunduran dalam bernegara dan berdemokrasi. Namun, mengambil yang baik di masa lalu, sejauh untuk kemajuan berbangsa, bernegara dan berdemokrasi sesungguhnya merupakan langkah ke depan yang jauh lebih

baik. *Keempat*, alasan sosio ekonomi. Setiap pembangunan harus berkelanjutan, terutama menyangkut infrastruktur dalam skala nasional. Tidak gonta ganti atau tidak searah seperti yang dilakukan pada era reformasi ini. Belum tercapainya maksud pembangunan ekonomi sebagai amanat konstitusi adalah terutama karena penyimpangan kiblat pembangunan dari roh dan jiwa konstitusi.

Hal menarik disampaikan oleh Yudi Latif, dari perspektif sosiologis tentang GBHN, Bola salju wacana restorasi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) terus menggelinding sejak dilemparkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dari berbagai arus pendapat yang berkembang, ada satu dimensi penting yang luput dari perhatian para pengamat, yakni dimensi sosial sebagai antiseden tentang perlu atau tidaknya GBHN bagi suatu negara. Pilihan-pilihan hukum ketatanegaraan dan kebijakan itu sesungguhnya harus mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis, yang justru sering diabaikan para pemerhati dan pengambil keputusan di negeri ini. Dalam kaitannya dengan model demokrasi yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

Di bawah sistematis negara kekeluargaan, Indonesia memilih demokrasi permusyawaratan dengan lebih menekankan daya-daya konsensus (mufakat) dalam semangat kekeluargaan. Demokrasi permusyawaratan ini berusaha mengatasi paham perseorangan dan golongan yang dihimpun bukan saja dikte-dikte diktator mayoritas, melainkan juga didikte-dikte tirani minoritas dari oligarki elite penguasa dan pengusaha. Dalam ungkapan Soekarno, demokrasi kita janganlah mengikuti model "mayorokrasi" dan "minorokrasi". Didalam negara kekeluargaan dengan demokrasi konsensus ala Indonesia, kebijakan dasar (rencana) pembangunan tidaklah diserahkan kepada Presiden sebagai ekspresi kekuatan majoritarian democracy. Kebijakan dasar rencana pembangunan harus dirumuskan bersama melalui mekanisme konsensus seluruh representasi kekuatan politik rakyat dalam suatu lembaga perwakilan terlengkap, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dengan kata lain, Presiden tidak mengembangkan politik sendirian, tetapi harus menjalankan prinsip-prinsip direktif yang ditetapkan dalam suatu GBHN. GBHN memiliki fungsi yang penting dalam mewujudkan konsepsi negara kekeluargaan dan kesejahteraan. Selain memberikan prinsip-prinsip direktif yang memberikan haluan pembangunan nasional secara menyeluruh (semesta), bertahap dan berencana, GBHN juga memiliki fungsi alokatif dalam pendistribusian sumber daya ekonomi. Di dalam sistem kapitalisme, fungsi alokasi sumber daya strategis diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Dalam sistem etatisme, fungsi alokasi sumber daya diserahkan pada pusat komando diktatorial. Dalam sistem Pancasila, alokasi sumber daya tidak hanya tunduk pada mekanisme-mekanisme tersebut, melainkan juga melalui mekanisme permusyawaratan rakyat dalam MPR.

Keberadaan GBHN sangat penting manakala pembangunan Indonesia saat ini dihadapkan pada problem diskontinuitas dan diskonektivitas. Para pengambil keputusan politik terjebak pada kepentingan jangka pendek dan terfragmentasi menurut garis kepartaian dan kedaerahan. Dengan kondisi seperti ini, pilihan-pilihan kebijakan sering bersifat tambal sulam dan parsial; mengabaikan pilihan-pilihan strategis yang bersifat fundamental dan integral yang memerlukan kesinambungan dan keterpaduan berjangka panjang. Sangatlah jelas dalam

perspektif menimbang pentingnya GBHN kembali menjadi haluan dalam berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Pasalnya, jangan sampai kemajuan Indonesia menjadi 'jalan ditempat' hal itu terjadi karena persoalan hanya dengan reasoning untuk menjaga kemurnian sistem pemerintahan presidensial melalui doktrin (*leave us alone*), menyerahkan arah pembangunan negara pada satu cabang kekuasaan negara yaitu Presiden (eksekutif).

Program-program pembangunan di Indonesia didasarkan pada program presiden terpilih, tidaklah tepat dalam konteks negara sebesar dan semajemuk Indonesia. Sebagaimana ditulis I Basis Susilo, India saat ini sudah memasuki Repelita 12 yang ingin mentransformasi negeri ini kedalam negara maju, Thailand kini memasuki repelita ke 12, pembangunan SDM, mendukung riset dan pengembangan untuk meningkatkan inovasi dan nilai tambah produk memperbaiki angkatan kerja, meningkatkan daya saing UKM dan mendukung gerakan 'ekonomi digital'. Tiongkok, memasuki Repelita 13, bahkan pada 2025 negeri ini mencanangkan target menyamai Jepang, 2050 jadi negara maju secara relatif, 2080 menyamai AS dan 2100 menjadi negara adidaya yang menggantikan AS.

Dengan adanya PPHN maka visi pembangunan Indonesia tidak hanya diserahkan pada satu cabang kekuasaan negara yaitu presiden tetapi juga melibatkan representasi politik lainnya yang terwadahi dalam MPR yaitu representasi politik dan representasi daerah - lebih sempurna jika ada representasi fungsional (utusan golongan). Kekhawatiran yang berlebihan sesungguhnya sangatlah tidak beralasan toh sudah ada kesepakatan bahwa dalam konteks sistem politik (ketatanegaraan) Indonesia sudah ada konsensus untuk tetap pada pakem sistem pemerintahan Presidensial selain meneguhkan negara kesatuan dalam bentuk negara dan tidak akan mengubah pembukaan UUD 1945.

Litbang Kompas melakukan jajak pendapat dengan judul GBHN, membumikan panduan sebagaimana yang ditulis oleh Ayu Siantoro, wacana menghadirkan kembali garis-garis besar haluan negara diyakini publik dapat menjawab kegelisahan karena merangkum arah pembangunan pusat dan daerah. Mayoritas responden sebanyak 86 persen merespons positif setuju gagasan untuk menghadirkan lagi GBHN yang bersifat ideologis daripada rencana pembangunan jangka panjang nasional (RJPN). Lebih lanjut, sebagian publik yakin bahwa GBHN atau panduan lain yang bersifat ideologis dan konsisten mampu mengarahkan pembangunan jangka panjang menuju kemakmuran rakyat, terpenting adalah negara ini memiliki panduan yang membumi untuk memandu ke mana negeri ini akan melaju.

Sehingga dalam konteks ini, sebagai ikhtiar untuk Indonesia yang lebih baik kedepan dengan mengakomodasi lagi PPHN dalam Konstitusi UUD 1945 dan yang terpenting dibutuhkan kesadaran bersama (konsensus) bahwa Indonesia harus menjadi negara besar dan bangsa yang maju. Dalam konteks visi dan arah yang jelas dalam pola pembangunan yang berkesinambungan tidak terputus oleh agenda politik lima tahunan karena terjadi pergantian kepemimpinan nasional maka perlu agar ada konsensus tentang pengelolaan negara yang didasarkan kepada kebutuhan akan kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Konsensus itu tentunya harus diakomodasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahwa kemudian ada sejarah yang tidak benar dalam pemberlakuan GBHN di masa lalu tapi kemudian tidak harus menolak mentah-mentah tentang

gagasan tentang pemberlakuan GBHN, sehingga semangatnya adalah mengkritisi dan memberikan jalan agar sistem ketatanegaraan Indonesia agar lebih baik.

Oleh karenanya, dalam perspektif kepentingan negara, perlu visi (cara pandang) negara dalam mengelola potensi luar biasa yang dimiliki bangsa Indonesia dengan luas wilayahnya yang 75 persen dikelilingi laut, panjang garis pantai 95.181 KM, negara dengan garis pantai terpanjang ke-4 di dunia, 17.440 ribu pulau, 129 Gunung merapi, kekayaan alam yang tidak terbarukan, 1128 suku, 746 bahasa, jarak dari Sabang sampai Merauke 5428 km jarak yang sama antara Teheran ke London, melintasi 10 negara Eropa dan sumber daya manusia dengan jumlah penduduk 250 juta orang sebagai unsur terpenting semuanya ada di Indonesia sangat diperlukan skema dalam mengelola negara yang berkelanjutan yang tidak berhenti karena agenda politik setiap lima tahunan, maka sangat diperlukan pola pembangunan bagi bangsa Indonesia yang sifatnya nasional, menyeluruh (semesta) dan berkesinambungan.

Sehingga menjadi relevan jika melihat *resources* yang dimiliki bangsa Indonesia akan menjadi negara yang besar dan bersaing dengan negara maju lainnya asalkan memiliki 'rute' yang jelas yaitu rute menuju Indonesia Raya. Maka, sebagaimana rute, arah perlu Pengelolaan negara yang didasarkan pada kebutuhan Indonesia, bukan rute, arah negara lain. Pahalanya, cara berjuang Indonesia pasti tidak sama dengan negara-negara lain yang memiliki geopolitik yang sangat jauh berbeda dengan Indonesia. Sehingga dengan adanya 'rute' yang jelas itu perhatian dan energi bangsa bisa diproyeksikan dan diprioritaskan sehingga produktif untuk pembangunan negara.

Visi pimpinan nasional menjadi sesuatu yang sangat penting. Pahalanya, dalam konteks bernegara dibutuhkan adanya visi, yaitu arah yang dibutuhkan setiap orang yang berada di dalamnya untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengapa Visi itu penting dalam konteks penyelenggaraan negara karena Setiap jaman menghadapi tantangan yang berbeda sehingga Negara-Bangsa ini membutuhkan harapan, membutuhkan sebuah 'mimpi indah' tentang Indonesia di masa mendatang. Apalagi di Tahun 2045 Indonesia tepat berusia 100 Tahun. Sebagaimana mimpi bersama tentang Indonesia Raya yang dicita-citakan yaitu janji kemerdekaan sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesimpulan

Keberadaan GBHN sangat penting ketika pembangunan Indonesia saat ini dihadapkan pada problem diskontinuitas dan diskonektivitas. Sangatlah jelas dalam perspektif menimbang pentingnya GBHN kembali menjadi haluan dalam berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Oleh karena itu Indonesia perlu visi besar negara yang kemudian menjadi konsensus bersama seluruh entitas bangsa sehingga pengelolaan negara mempunyai arah yang jelas. Indonesia perlu visi pembangunan yang terencana, berkelanjutan dan menyeluruh tidak hanya mengikuti masa periodisasi presiden dan setelah presiden berganti maka berubah lagi arah pembangunannya, tidak adanya visi menjadikan negara berputar-putar menghabiskan energi bangsa untuk hal-hal yang tidak penting. Kesadaran berbangsa dan bernegara perlu melihat potensi yang dimiliki berdasar pada geografi politik yang ada.

Sebagaimana pendapat Napoleon, politik negara berada dalam geografinya, Begitu pula Bismarck berpendapat, Hanya satu hal yang tidak pernah berubah dalam politik-politik negara yaitu geografinya dan Bung Karno menyampaikan, jika manusia Indonesia tidak lagi peka dan memahami potensi besar geopolitiknya maka ia akan tetap jatuh menjadi bangsa Kuli yang menjadi kuli di antara bangsa-bangsa. Visi pimpinan nasional menjadi sesuatu yang sangat penting. Pasalnya, dalam kontek bernegara dibutuhkan adanya visi, yaitu arah yang dibutuhkan setiap orang yang berada di dalamnya untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Mengapa Visi itu penting dalam kontek penyelenggaraan negara karena Setiap jaman menghadapi tantangan yang berbeda sehingga Negara-Bangsa ini membutuhkan harapan, membutuhkan sebuah 'mimpi indah' tentang Indonesia di masa mendatang. Apalagi di Tahun 2045 Indonesia tepat berusia 100 Tahun. Sebagaimana mimpi bersama tentang Indonesia raya yang dicita-citakan yaitu janji kemerdekaan sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daftar Pustaka

- I Basis Susilo. 2016. Urgensi GBHN di Era Reformasi. Kompas, 23 Januari 2016
- Karsidi, Ravik. 2016. GBHN untuk Kesejahteraan. Kompas, 21 Januari 2016.
- Latif, Yudi. 2016. Basis Sosial GBHN. Kompas 12 Februari 2016.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Yuhana, Abdy. Eksistensi MPR. HU Pikiran Rakyat, Januari 2014.
- Yuhana, Abdy. 2020. Kedaulatan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Bandung : Fokusmedia.
- Yuhana, Abdy. 2021. Amandemen Terbatas UUD 1945. HU Pikiran Rakyat, September 2021.
- Yuhana, Abdy. 2022. Rute Menuju Indonesia Raya, HU Pikiran Rakyat, 26 Januari 2022.
- Yuhana, Abdy. 2022. Visi Pimpinan Nasional, HU Pikiran Rakyat, 16 Februari 2022.
- Siantoro, Ayu. 2016. GBHN Membumikan Panduan. Kompas, Februari 2016.

Cara Mengutip

MENIMBANG PENTINGNYA HALUAN NEGARA BAGI INDONESIA RAYA. (2026). *Jurnal Persatuan*

Nasional, 3(1). <https://jurnalpersatuannasional.id/index.php/jpnasional/article/view/34>

Lisensi

Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Persatuan Nasional



Artikel ini berlisensi [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).